

BAB IV

ANALISIS

A. Perilaku Politik di Indonesia Pasca Reformasi

Semua negara, semua bentuk kekuasaan, yang pernah memegang dan tengah memegang kekuasaan atas nasib orang banyak sebelum-sebelum ini berbentuk baik itu republik atau negara yang dipimpin oleh negara. Status kepangeranan diperoleh baik secara turun-temurun, di mana keluarga kerajaan telah hadir dalam periode waktu yang cukup lama, atau bahkan baru. Status yang termasuk baru bisa jadi baru sama sekali, seperti halnya Milan bagi Francesco Sforza, atau bahwa mereka ini, sebagaimana dulunya, semacam ditambahkan pada negara yang secara turun-temurun memang sudah diperintah oleh pangeran yang telah berhasil mendapatkan negeri itu, seperti halnya pangeran yang telah berhasil mendapatkan negeri itu, seperti halnya kerajaan Naples bagi Raja Spanyol.

Daerah kekuasaan tersebut oleh karenanya kemudian membiasakan diri hidup di bawah pimpinan seorang pangeran, atau hidup dalam udara kebebasan. Sedangkan lainnya adalah daerah-daerah yang didapat baik melalui kekuatan senjata sang pangeran itu sendiri, atau melalui bantuan pihak lainnya, ataupun mungkin dari keberuntungan atau dari kemampuannya sendiri.¹

¹ Nicollo Machiavelli, *Sang Pangeran*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2014, h. 33.

Machiavelli yang saling mengenal akrab dengan musuh-musuhnya, mengatakan, “Dengan mengamati semua tindakan Pangeran (Caesar), saya tidak menemukan sesuatu yang perlu disalahkan; sebaliknya saya merasa harus, sebagaimana telah saya lakukan, menunjukkan bahwa dia adalah contoh yang harus diteladani oleh semua orang bernasib mujur dan meraih kekuasaan setelah menyingkirkan lainnya.” Ada sebuah bab dalam buku *Discourse*, “Of Ecclesiastical Principalities”, yang nyata-nyatanya menyembunyikan sebagian pemikiran Machiavelli. Alasan penyembunyian ini, tidak diragukan lagi, adalah bahwa *The Prince* dirancang mengambil hati Medici telah menjadi Paus (Leo X). Tentang kerajaan-kerajaan eklesiastikal, menurutnya dalam *The Prince*, satu-satunya persoalan adalah menaklukkannya, karena ketika diserang, kerajaan-kerajaan tersebut dipertahankan oleh adat-istiadat religius kuno, yang menjaga raja-rajanya tetap berkuasa tanpa mempedulikan bagaimana perilaku mereka. Raja-rajanya tidak membutuhkan tentara (demikian menurutnya), karena “mereka disangga oleh faktor-faktor yang tinggi dan tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. “Mereka dimuliakan dan dijaga oleh Tuhan,” dan “karya orang-orang congkak dan bodohlah yang membahasnya.”²

Interpretasi terpenting terhadap teori politik Machiavelli dalam beberapa dasawarsa terakhir, terutama yang diasosiasikan

² Betran Russell, *Sejarah Filsafat Barat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, h. 665.

dengan karya Skinner dan Pocock (1975), secara umum telah menempatkannya di dalam tradisi humanis kewarganegaraan Firenze dan Italia Renaisans dan berfokus pada tema-tema republikanya. *Discourses* Machiavelli, kesetiiaannya kepada teori klasik, komitmen-komitmennya sebagai seorang warga kota, dan pengalamannya dengan krisis-krisis yang menghantam rezim-rezim republik di Italia (kecuali di Venezia) ditonjolkan dengan hampir mengabaikan reputasi tradisional Machiavelli. Tetapi, sebuah studi yang lebih baru mengenainya juga mengakui praktik ‘seni bernegara’ Machiavelli yang anti klasik dan lebih sinis, pelopor ajaran *reason of state*.

Pandangan yang layak dihormati tentang Machiavelli sebagai seorang realis politisi dan penganjur politik kekuasaan amoral kembali ditegaskan beberapa dasawarsa yang lampau oleh Leo Strauss, yang menganggap Machievelli sebagai pendiri utama modernitas dan masalah-masalahnya. Dalam hal itu, Machiavelli ditampilkan telah meninggalkan unsur-unsur utama tradisi klasik dan tradisi Alkitab (termasuk hukum alam), mendistorsi teks-teks klasik demi tujuannya sendiri, kadang-kadang dengan menggunakan metode-metode esoteris dalam prosesnya.³

Bagi Machiavelli kekuasaan dalam pengertian yang luas adalah kemampuan untuk mencapai sebuah hasil yang diinginkan, terkadang diartikan sebagai “kekuasaan untuk” melakukan

³ Gerald F. Gaus, etal, *Handbook Teori Politik*, Nusa Media, Bandung, h. 808.

sesuatu. Ini mencakup segala sesuatu mulai dari kemampuan seseorang untuk menjaga kehidupannya sendiri hingga kemampuan pemerintah ekonomi. Dalam politik, meskipun begitu, kekuasaan biasanya dipahami sebagai sebuah relasi atau hubungan: yaitu, kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain dalam sebuah cara yang bukan pilihan mereka. Ini maknanya adalah memiliki ‘kekuasaan atas’ orang lain. Lebih sempit lagi, kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memberikan penghargaan atau hukuman, dan ini lebih dekat kepada makna kekuatan atau manipulasi, yang kontras dengan makna ‘pengaruh’.⁴

Machiavelli bisa menyebutkan beberapa pemikir abad pertengahan yang memandang manusia dengan rasa tidak percaya. Meski demikian, ia tidak bisa menunjukkan preseden akan pandangan watak manusia yang ditanyakannya dalam paragraf terkenal mengenai singa dan rubah. Dalam mendiskusikan cara-cara bagaimana raja harus menjaga kepercayaan yang baik dengan warga negaranya dan orang-orang yang bekerja dengannya, ia menyatakan bahwa ada dua cara pertama adalah cara manusia, yang kedua adalah cara binatang. “ Karena cara yang pertama seringkali tidak mencukupi, penguasa terkadang perlu melakukan cara kedua. “Oleh karenanya, adalah perlu bagi raja untuk tahu betul bagaimana menggunakan cara manusia dan binatang.” Dalam menjalankan watak binatangnya, manusia harus belajar

⁴ Andrew Heywood, *Politik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 9.

meniru rubah dan singa karena “singa tidak bisa melindungi dirinya dari jebakan dan rubah tidak bisa melindungi dirinya dari serigala.”⁵

Seorang penguasa yang baik harus:

*“Menjadi rubah untuk mengetahui jebakan dan singa untuk menakut-nakuti serigala. Mereka yang hanya ingin menjadi singa saja tidak memahami hal ini. Oleh karena itu, penguasa yang hati-hati tidak harus menjaga kepercayaan jika hal ini akan bertentangan dengan kepentingannya, dan ketika alasan-alasan yang mengikatnya tidak ada lagi.”*⁶

Tujuan pokok Machiavelli adalah demi kebaikan rakyat Italia. Tidak ada alasan atau keharusan menolak penilaian ini. Tuduhan klasik terhadap pemikir Florentine ini tidak diarahkan pada tujuan Machiavelli tetapi pada kerangka kerja teoritis yang dibangunnya serta kelemahan logikanya. Machiavelli mengikuti tradisi kuno dalam membedakan antara kerajaan dan tirani yang pertama merupakan penjelmaan kekuasaan umum rakyat; yang kedua adalah kekuasaan untuk memenuhi kepentingan pribadi penguasa. Penguasa yang baik adalah orang “yang tujuannya bukan untuk kepentingan dirinya sendiri tetapi untuk kebaikan umum, dan bukan demi kepentingan pengganti-penggantinya tetapi demi tanah air yang menjadi milik semua orang.

⁵ Henry J. Schamndt, *Filsafat Politik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, h. 255.

⁶ *Ibid*, h. 225.

Demi tujuan yang baik, sebagaimana dinyatakan dalam *Discourse*, semua orang yang diperlukan bisa dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Seorang penguasa tidak wajib membahas apakah tindakannya secara moral layak atau adakah batas-batas etis yang boleh dilanggarnya. Tidak terdapat kejahatan dalam politik, hanya kesalahan kecil. Terbebas dari perlunya pertimbangan moral, raja bisa mengerahkan seluruh energinya untuk keputusan empiris. Semua cara tirani secara syah terbuka baginya. Satu-satunya pembatalan adalah bahwa ia harus menggunakannya untuk tujuan yang benar (kebaikan umum sebagaimana yang didefinisikan Machiavelli) dan bahwa ia mempunyai dasar yang masuk akal dalam mengatakan bahwa cara-cara yang dipilih akan kondusif bagi pencapaian tujuan yang diinginkan.⁷

Perlu dicatat bahwa Machiavelli tidak pernah meletakkan pendapat politik apa pun di atas dasar-dasar Kristen. Para penulis Abad Pertengahan memiliki sebuah konsepsi kekuasaan yang “absah”, yakni kekuasaan Paus dan Kaisar, atau yang berasal dari keduanya. Para penulis Utara, bahkan yang belakangan seperti Locke, berpendapat tentang apa yang terjadi di Taman Eden dan beranggapan bahwa Paus dan Kaisar dapat menjadi bukti adanya jenis-jenis kekuasaan tertentu “absah”. Machiavelli tidak memiliki konsepsi semacam ini. kekuasaan diperuntukkan bagi mereka

⁷ *Ibid*, h. 257.

yang memiliki keterampilan untuk merebutnya dalam sebuah kompetisi bebas.⁸

Masalah penting lain dalam upaya memahami Machiavelli timbul dari kontradiksi yang nampak antara *The Prince* dan *Discourses*. Dari pembacaan terhadap *Discourses*, kita menemukan bahwa perhatian utama pemikir Florentine ini adalah kebaikan rakyat Italia; dalam *The Prince* kita disuguhkan sesuatu yang bisa disebut bagai “buku pegangan bagi para tiran.” Kesarjanaan modern berusaha merekonsiliasikan keduanya dengan menyatakan bahwa *The Prince* harus dibaca dalam sinaran *Discourses*. Contoh mengenai hal itu ditemukan dalam pendahuluan Max Lerner pada *The Prince* di mana ia berpendapat bahwa ketika membicarakan Machiavelli juga tidak boleh melupakan *Discourses*; dan jika kita ingin menilai orang ini, lebih adil menilainya dengan buku yang membahas semua sistem politiknya daripada dengan pamflet yang ia rancang untuk mempengaruhi atau mendapatkan perhatian tokoh tertentu.⁹

Dengan melihat kekuasaan politiknya sebagai kekuatan independen yang diatur oleh hukum fungsionalnya sendiri dan terlepas dengan semua prinsip moral yang bisa diterapkan pada tindakan pribadi manusia, filsafat politik Machiavelli membuka pintu bagi kekuasaan negara yang tidak terbatas bagi totaliterianisme fasis serta absolutisme Hobbes. Singkatnya,

⁸ Bertrand Russell, *op.cit*, h. 668.

⁹ Henry J. Schamndt, *op.cit*, h. 262.

kerangka kerja teoritisnya menunjukkan perlunya kekuasaan absolut, yang mungkin lebih baik berada di tangan raja yang bijak, tetapi sifat absolut ini terlepas dari siapa yang akan menjalankan kekuasaan.¹⁰

Pemikiran Politik Machiavelli yang “menghalalkan segala cara” untuk mendapatkan kekuasaan banyak diminati oleh orang-orang yang ingin memiliki kekuasaan. Dalam formulasi klasik pemikiran Machiavelli, masalah tangan-tangan kotor memuat semacam konflik antara dua moralitas yang satu cocok dengan kehidupan biasa, yang lain cocok dengan kehidupan politik. Terkadang Machiavelli mengatakan bahwa moralitas politik tidak hanya berbeda dari--- melainkan dalam lingkupnya benar-benar menggantikan moralitas biasa. Kebaikan negara (dan kebajikan pangeran) mengundang “sesuatu sama dengan keburukan,” “sementara yang sama dengan kebajikan” bisa membawa kehancurannya. Di sini, Machiavelli sama dengan banyak filsuf moral modern tentang apa yang mungkin disebut pandangan yang koheren terhadap masalah. Suatu moralitas koheren berlaku baik pada kehidupan pribadi maupun kehidupan publik, atau yang satu berlaku eksklusif pada kehidupan publik.

Machiavelli mengemukakan suatu pandangan lain yang lebih mengacaknya lagi. Pandangan itu mengimplikasikan tidak adanya koherensi dasar dalam moralitas politis: konflik antara prinsip-prinsip orang yang bertahan secara permanen dalam

¹⁰ *Ibid*, h. 264.

lingkup politik. Politisi tidak dapat luput dari konflik entah dengan menurunkan prinsip-prinsip ke lingkungannya yang tepat, atau dengan menurunkan prinsip-prinsip lebih tinggi untuk keputusan final. Berdasarkan pandangan ini, sang pangeran terjepit di antara dua moralitas. Dia berbohong dan membunuh demi kebaikan negara, namun dia juga tahu bahwa tindakan itu salah, dan bahwa, walaupun dimaafkan, tindakan tersebut tak pernah bisa dibenarkan. Kekejaman, betapa pun perlunya, tetap merupakan suatu “kejahatan dalam dirinya sendiri.”¹¹

Politik ala Machiavelli (1469-1527) sedang digandrungi oleh sejumlah politikus dan partai politik. Bagi Machiavelli seperti terungkap dalam bukunya *Il Principe* dunia politik itu bebas nilai. Artinya, politik jangan dikaitkan dengan etika (moralitas). Yang terpenting dalam politik adalah bagaimana seorang Raja/penguasa berusaha dengan berbagai macam cara untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan agar menjadi selanggang mungkin. Meskipun cara-cara tersebut sangat inkonstitusional bahkan bertentangan dengan nilai-nilai moral. Hal ini tampak dalam praksis sejumlah kader partai politik yang menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan bahkan melakukan tindakan korupsi untuk melanggengkan kekuasaan di masa yang akan datang. Praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme yang kental dalam "area kekuasaan" menjadi salah satu indikator

¹¹ Dennis F. Thompson, *Etika Politik Pejabat Negara*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2000, h. 2.

mewabahnya politik ala Machiavelli. Atau mungkin saja terjadi dalam usaha penggalangan dana partai-partai politik secara tidak halal melalui tindakan korupsi yang jelas-jelas melanggar moralitas.

Termasuk di dalamnya fenomena "kampanye hitam" yang lazim terjadi menjelang pilpres/pemilu/pemilukada menjadi salah satu tanda menguatnya teori politik ini diterapkan secara masif dalam dunia perpolitikan di tanah air. Selain itu, politik dinasti kekeluargaan menjadi representasi telak dan tak terbantahkan dari teori politik ala Machiavellisme-aliran politik yang menerapkan teori Sang Maestro. Hal ini tampak kental dalam tubuh Partai Demokrat saat ini ketika Presiden SBY menjadi Ketua Umum Partai dan Putranya Ibas menjadi Sekjennya. Teori politik ala Machiavelli tidak bisa diterapkan di Indonesia karena Indonesia merupakan negara hukum di mana hukum dan etika harus menjadi panglima dalam perpolitikan yang pro kerakyatan dan bukan pro kekuasaan. Jika hal ini terus terjadi maka pantaslah jika banyak masyarakat Indonesia terutama kaum muda saat ini menjadi alergi dengan politik, alergi dengan partai politik, karena praksis politik di negeri ini sudah benar-benar kotor alias menjauhkan diri dari etika (mengacu pada hasil survei Indo Barometer baru-baru ini). Ketika ada politikus yang mengatakan, "buang moralitas/etika jika masuk dalam dunia politik" sesungguhnya ungkapan ini telah menggambarkan bahwa memang aliran Machiavellisme dalam

perpolitikan "demi kekuasaan semata" telah menjadi sebuah "gaya perpolitikan" di Indonesia.¹²

Dari penjelasan diatas kondisi realitas perpolitikan Indonesia mengalami hal serupa seperti persepsi dari Machiavelli tentang "Standard Nilai Moral". Di Indonesia saat ini banyak kasus korupsi yang merugikan banyak masyarakat, para koruptor mementingkan diri sendiri dan mengabaikan kepentingan banyak orang, pada dasarnya kodrat manusia adalah mementingkan diri sendiri. Kekuasaan di Indonesia menjadi sesuatu yang diperebutkan banyak orang untuk dapat menduduki kursi kekuasaan. Banyak sekali macam korupsi ini tidak dipisahkan dari interaksi kekuasaan. Orang yang terjun di dunia politik masih dengan mentalitas *animal laboran* (Hannah Arendt, 1958) di mana orientasi kebutuhan hidup dan obsesi akan siklus produksi-produksi sangat dominan, politikus cenderung menjadikan politik tempat mata pencaharian utama. Sindrom yang menyertai salah satunya adalah korupsi. Hal ini sangat mungkin karena fasilitas kekuatan fisik (senjata), fasilitas politik (pejabat), dan ideologi (pejabat atau pemuka agama) tersebut sering dianggap sebagai sesuatu yang diperoleh dengan usaha atau suatu prestasi sehingga penggunaannya untuk bisa mendatangkan kekayaan dianggap

¹² Fajar, *Waspada Politik ala Niccolo Machiavelli di Indonesia*, Diunduh pada tanggal 01 April 2016 dari http://www.kompasiana.com/fajarbaru/waspada-politik-ala-niccolo-machiavelli-telah-digandrungi-di-indonesia_5528c4aff17e61b4058b4582.

wajar. Maka, tidak mengherankan bahwa tidak ada perasaan bersalah.¹³

Banyak orang melakukan korupsi atau suatu bentuk *banalisasi* korupsi. Jika banyak orang yang melakukannya menjadikan kejahatan ini sesuatu yang biasa. Seakan-akan kebiasaan harus bertanggung jawab. Kalau “semua bertanggung jawab” bukankah sama saja dengan tak ada yang bertanggung jawab? Persis seperti penjarahan yang dilakukan oleh seakan-akan tindakan itu sah karena semua ikut. Kalau semua ikut, seakan sama dengan untuk kepentingan “banyak orang melakukannya” dijadikan alibi tanggung jawab pribadi dan banalisasi (menjadikan biasa) kejahatan. Karena banyak orang melakukannya dan sudah menjadi kebiasaan, seolah-olah bisa mengubah yang jahat menjadi baik. Padahal, yang sebenarnya terjadi ialah bahwa kebiasaan jahat telah membungkam nurani pelaku.

Bila para pejabat bertindak berlawanan dengan kepercayaan yang diberikan, tradisi liberal menawarkan kepada warga pengikutnya bantuan terakhir dengan “naik banding ke Surga.” Tradisi itu kurang yakin untuk naik banding ke pengadilan duniawi. Kasus yang dimaksudkan di sini tidak lain dari kasus hukuman kriminal bagi pejabat. Hukum kriminal telah berfungsi lebih baik untuk menghukum kejahatan warga negara dibanding kejahatan pemerintah terhadap warga. Satu alasannya

¹³Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2014, cetakan keempat, h. 137.

yang tidak diragukan lagi adalah karena pemerintahlah yang mengelola sarana-sarana penghukuman.¹⁴ Pejabat-pejabat pemerintahan pun menghadapi konflik antara kewajiban demi kebaikan orang-orang tertentu dan kewajiban demi kebaikan publik. Kadang-kadang peran mereka yang mungkin salah jika dilakukan. Namun situasi sulit yang dihadapi para legislator sangat membingungkan, tidak hanya karena hubungan elektoral mereka dengan konstituen, melainkan juga karena hubungan mereka dengan rekan kolega.¹⁵

B. Perilaku politik di Indonesia Menyikapi Nilai-nilai Etika

Etika biasanya dimengerti sebagai refleksi filosofis tentang moral. Jadi, ketika etika lebih merupakan wacana normatif, tetapi tidak selalu harus imperatif, karena bisa juga hipotesis, yang membicarakan pertentangan antara yang baik dan yang buruk, yang dianggap sebagai nilai relatif. “Etika” ingin menjawab pertanyaan “bagaimana hidup yang baik?” Jadi, etika lebih dipandang sebagai seni hidup yang mengarah kepada kebahagiaan dan memuncak pada kebajikan.¹⁶ Pendapat Paul Ricoeur tentang “etika” dikaitkan dengan tradisi pemikiran filosofis Aristoteles yang lebih bersifat teledogis. Mau membidik hidup baik bersama dan untuk orang lain dalam kerangka memperluas lingkup kebebasan dan menciptakan institusi-institusi

¹⁴ Dennis F. Thompson, *op.cit*, h. 90.

¹⁵ *Ibid*, h. 139.

¹⁶ Haryatmoko, *op.cit*, h. 206.

yang lebih adil (menurut Eric Weil, titik tolak refleksi filsafat politik adalah etika politik). Konsepsi Ricoeur itu memasukkan sekaligus dimensi perilaku dan institusi serta memperhitungkan tiga dimensi etika politik. Kualitas moral pelaku merupakan faktor stabilitas tindakan yang berasal dari dalam diri pelaku, sedangkan institusi menjamin stabilitas tindakan dari luar diri pelaku. Maka, etika politik pun juga merefleksikan masalah hukum, tatanan sosial, dan institusi yang adil. Etika politik mengandung tiga dimensi, yaitu tujuan (*policy*), sarana (*polity*), dan aksi politik (*politics*). Agar etika politik tidak mengabaikan pra andaian-pra andaian dan keyakinan-keyakinan yang melatarbelakangi gagasannya, perlu peran filsafat politik. Maka, penjelasan filsafat politik dan perbedaannya dengan ilmu-ilmu politik dan ideologi dimaksudkan untuk menekankan fungsi reflektif dan kritisnya.

Refleksi karena filsafat politik merupakan upaya rasional untuk memahami struktur-struktur dasar pengalaman dan realitas politik. Ia menentukan cara pandang tertentu, menurut suatu penilaian, melalui penjelasan sebuah ideal yang menggadaikan konsepsi tentang manusia dan tujuannya. Maka, pendekatan ini berfungsi sebagai pembanding, kritik ideologi, konsektualisasi. Pembanding karena membandingkan realitas politik yang ada dengan pemikiran filsafat.¹⁷

Tuntutan pertama etika politik adalah “hidup baik bersama dan untuk orang lain”. Pada tingkat ini, etika politik

¹⁷ *Ibid*, h. 264.

dipahami sebagai perwujudan sikap dan perilaku politikus atau warga negara. Politikus yang baik adalah jujur, santun, memiliki integritas, menghargai orang lain, menerima pluralitas, memiliki keprihatinan untuk kesejahteraan umum, tidak mementingkan golongannya. Jadi, politikus yang menjalankan etika politik adalah negarawan yang mempunyai keutamaan-keutamaan moral.

Dalam sejarah filsafat politik, filsuf seperti Socrates sering dipakai sebagai model yang memiliki kejujuran dan integritas itu. politik dimengerti sebagai seni yang mengandung kesantunan. Kesantunan politik diukur dari keutamaan moral. Kesantunan itu tampak apabila ada pengakuan timbal balik dan hubungan *fair* di antara para pelaku. Pemahaman etika politik semacam ini belum mencukupi karena sudah puas apabila diidentikkan dengan kualitas moral politikus. Etika politik, yang hanya puas dengan koherensi norma-normanya dan tidak memperhitungkan *politik riil*, cenderung mandul. Namun, bukankah *politik riil*, seperti dikatakan Machiavelli, adalah hubungan kekuasaan atau pertarungan kekuatan? Masyarakat bukan terdiri dari individu-individu subjek hukum, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan yang berlawanan. Politik yang baik adalah politik yang bisa mencapai tujuannya, apapun caranya.

Dalam teori politik Machiavelli, dikatakan bahwa untuk mendapatkan kekuasaan dihalalkan segala cara. Akan tetapi, bagaimana dengan masalah “tujuan menghalalkan cara” yang bisa

diterima dari sudut pandang etika? Misalnya, menyiksa satu orang untuk menyelamatkan seribu orang. Dalam etika kasus ini masuk dalam kategori konflik kewajiban. Tetapi, perlu dua catatan. Pertama, ketika orang berusaha melegitimasi sarana melalui tujuannya entah sarana yang dipilih itu berupa kekerasan atau yang lain, harus terbuka terhadap evaluasi. Dengan kata lain, pilihan sarana harus terbuka bagi perdebatan, kritik, dan bukan hanya berhenti pada keyakinan. Bukan etika yang hanya mendasarkan pada keyakinan, tetapi etika tanggung jawab yang terasah melalui perdebatan.

Kedua, dalam kasus itu, proporsionalisme bisa menolong memberi argumen lain. Pendekatan ini menuntut empat syarat agar dari segi etika bisa diterima. Pertama, tujuan harus baik; kedua hanya akibat yang baik yang benar-benar dicari dan efek yang jelek tidak diperbolehkan atau hanya ditolerir; ketiga, ada alasan yang proporsional untuk mempertanyakan sebabnya, yang dalam kasus itu adalah keselamatan seribu orang; keempat, perbandingan harus seimbang antara dua akibat tersebut. Kalau akibat jeleknya lebih besar, berarti melawan moralitas.¹⁸

Situasi Indonesia saat ini tidak jauh dari gambaran Machiavelli itu. Politik dan moral menjadi dua dunia yang berbeda. Etika politik seakan menjadi dua dunia yang berbeda. Etika politik seakan menjadi tidak relevan. Relevansi etika politik terbuka apabila mampu mengatur institusi-institusi yang lebih

¹⁸ Haryatmoko, *op.cit.*, h. 121.

adil. Hanya di Indonesia kecurigaan antar kelompok sangat dalam. Padahal, etika politik mulai dengan adanya kepercayaan terhadap yang lain.¹⁹ Meskipun etika politik dirancang oleh penguasa kolonial di tahun 1900, sedangkan politik moral diperjuangkan oleh masyarakat Indonesia hampir seratus tahun kemudian, namun maka hakikinya adalah paralel, yaitu mengukuhkan peran etika atau moral sebagai pemandu sikap dan tingkah laku individu dan kolektif kalangan penguasa dan rakyat banyak di dalam kehidupan politik mereka. masyarakat Indonesia pernah berhasil mewujudkan tekad itu di awal kemerdekaan secara serius. Karena itu, tidaklah aneh adanya petinggi negara yang mundur dari jabatannya karena merasa bersalah, pengadilan korupsi bagi seorang menteri sampai aparat rendah, kabinet yang didukung oleh mayoritas anggota parlemen bubar karena kalah berargumentasi dengan pihak oposisi yang hanya minoritas.²⁰

Pembeda politisi dengan tukang pukul dalam berinteraksi politik adalah penguasaan, komitmen dan penampakan sikap dan tingkah-tingkah politik mereka kepada ideologi. Seabstrakta dan semakro apa pun tingkah-laku politik, selalu berpedoman kepada ideologi. Mereka terbiasa dengan cara *instink* mengideologikan tindakan mereka. karena etika dan moral adalah landasan dari

¹⁹ *Ibid.*, h. 225.

²⁰ Arbi Sanit, *Reformasi Politik*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 1998, h.

ajaran ideologi, maka dengan sendirinya politisi yang terkait kepada ideologi itu terikat pula kepada etika dan moral.

Kualitas etik para pelaku politik Indonesia mulai tererosi, tatkala sistem kompetisi kekuasaan digantikan oleh sistem kekeluargaan yang memberi peluang besar kepada pemusatan kekuasaan. Di bawah sistem kekuasaan terpusat sejak Sistem Politik Demokrasi Terpimpin (1959-1965) dan Sistem Politik Demokrasi Pancasila (1965-sekarang) berlangsung depresiasi etika dan moral dalam kehidupan masyarakat bangsa-negara. Sungguhpun begitu, kader erosinya berbeda di antara kedua periode sistem kekuasaan tersebut.²¹ Kebohongan politik yang dilakukan oleh pejabat, aparat, dan politis, dan melawan etika proses politik, karena memanipulasi atau mempermainkan hak politik rakyat. Kebohongan politik mematikan proses pertukaran nilai dan kepentingan di antara penguasa dan rakyat, sehingga keuntungan hanyalah menjadi milik penguasa. Akibatnya, keadilan terancam oleh politiknya penguasa.

Hal ini semakin sering terjadi. Kampanye pemilu sudah berfungsi sebagai kebohongan massal, sebab politisi merasa kampanye bukan janji. Di masa krisis moneter dan ekonomi ini saja, para menteri melakukan kebohongan kolektif. Penggunaan politik memang varian dari memperlakukan orang cara politik. Akan tetapi, keduanya sama-sama melawan etika tentang keadilan di dalam politik, karena interaksi kekuasaan hanya menguntungkan

²¹ *Ibid*, h. 32.

penguasa dan aparat negara. Pertukaran depolitisasi rakyat dengan kemajuan pembangunan ekonomi, ternyata lebih menguntungkan pemerintah ketimbang rakyat. Sebab, pada saat kemajuan ekonomi terjadi, rakyat tidak berdaya untuk mengontrol pendistribusiannya, lantaran tidak mempunyai kekuatan politik yang memadai.²²

Para pejabat pemerintah melakukan perbuatan-perbuatan immoral karena rakus, ingin berkuasa, atau loyal kepada keluarga dan kroninya. Tetapi jenis immoralitas yang paling mengejutkan dalam jabatan pemerintahan tampil dalam satu wajah yang paling luhur. Bahwa immoralitas itu dilakukan, bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan demi melayani kebaikan publik. Masalah tangan-tangan kotor itu menyangkut pemimpin politik yang demi kepentingan publik melanggar prinsip-prinsip moral. Masalahnya berasal dari dunia raja-raja dan pangeran, yang karena alasan negara melangkahi moralitas konvensional zaman mereka. Hal tersebut muncul lagi dalam zaman saat ini yang disebut drama revolusioner. Dalam drama karya Sartre yang memberikan suatu nama modern kepada masalah ini, pemimpin partai revolusioner lah yang memiliki tangan kotor sampai batas siku. Selanjutnya, beberapa ahli teori politik mengemukakan bahwa para pemimpin dari negara demokratik yang mapan mungkin memiliki tangan yang tidak kurang kotornya.²³

²² *Ibid*, h. 34.

²³ Dennis F. Thompson, *op.cit*, h. 1.

Para ahli teori ini benar. Mereka melihat kotoran pada tangan-tangan pejabat di negara-negara demokrasi modern, namun mereka gagal mengapresiasi perbedaan yang dibuat oleh demokrasi. Karena para pejabat di negara demokrasi diandaikan bertindak dengan persetujuan warga negara, mereka tidak bermasalah dalam dal diandaikan oleh masalah dalam bentuk tradisionalnya. Tetapi jika berani bertindak tanpa persetujuan itu, mereka tidak hanya melakukan kesalahan, melainkan juga mendatangkan keraguan pada dasar justifikasi keputusan itu sendiri. Mereka merusak beberapa kondisi wacana moral yang perlu untuk menilai moralitas dari keputusan apa pun dalam sebuah demokrasi. Dalam hal ini, masalah tradisional tentang tangan-tangan kotor demokrasi.²⁴

C. Analisis Perilaku Politik di Indonesia dalam Filsafat Politik Niccolo Machiavelli

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa kancah dunia politik khususnya di negara Indonesia sangat kentara dengan upaya manipulasi dan kelicikan dari berbagai pihak. Walaupun saya kira tidak semuanya pelaku politik di Indonesia melakukan praktek perpolitikan yang sama. Namun, di sini saya mencoba memberikan kritikan terhadap kancah dunia perpolitikan negara kita, karena realitas menunjukkan bahwa politik di negara ini sudah sangat kentara dengan praktek politik yang tak beretika.

²⁴ *Ibid*, h. 2.

Politik merupakan salah satu aspek yang sangat signifikan dalam keberlangsungan suatu negara. Baik – buruknya perkembangan suatu negara sangat tergantung pada sistem politik yang digunakan dan subjek atau pelaku dari sistem politik tersebut. Sering kali kita lihat, orang yang senantiasa menggembor-gemborkan kemurnian berpolitik namun kenyataannya ia juga yang melakukan manipulasi purity dalam praktek berpolitik. Ini menunjukkan bahwa dalam kancah perpolitikan negara kita selalu ada- kawasan moralitas yang sangat sensitif-, sehingga sering kali para pelakunya tidak bisa bersikap konsisten terhadap tujuan atau prinsip yang dikukuhkan sebelumnya. Kini yang harus kita pertanyakan, adakah etika berpolitik yang harus kita pegang? Mungkin pertanyaan tersebut sering kali muncul dalam benak pikiran kita, di sini kita hanya bisa menilai dan menganalisa sejauh pengetahuan kita mengenai etika berpolitik di negara ini. Perihal etika berpolitik, saya kira perlu adanya pengkajian ulang terhadap hal ini, mengapa demikian?

Karena permasalahan politik ini merupakan permasalahan yang signifikan yang solusinya mungkin takkan bisa kita temukan secara spontan, tapi perlu adanya pengkajian dan analisa yang lebih mendalam dan radikal dalam menyelesaikan permasalahan ini. Kita yakini bahwasanya aspek politik merupakan salah satu aspek yang akan menentukan kedisdayaan suatu negara, di samping ekonomi dan militer. Banyak negara di dunia yang

kemudian menjadi negara yang besar dan berkembang karena kelincihannya dalam berpolitik, semisal AS yang mungkin kita semua sudah meyakini kelincihan politiknya. Semua kebijakan yang AS lakukan, sedikit-banyaknya akan mempengaruhi kebijakan negara-negara lainnya di dunia, baik itu kebijakannya dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan militer.

Bisa lihat realitas yang ada, AS dewasa ini menjadi negara yang mempunyai kekuasaan politik yang universal. Di bidang ekonomi, sistem kapitalisnya digunakan dan diadopsi oleh hampir seluruh negara di dunia. Kemudian sistem politiknya, militernya, dll hampir semua negara di dunia mencoba menerapkan dalam sistem kehidupan negaranya. Bagaimana dengan negara kita? Tak disangsikan lagi, negara yang konon katanya merupakan negara yang beragam baik itu beragam dalam bentuk etnis, budaya, bahasa, agama, dll, keberagamannya itu sangat mempengaruhi etika berpolitik di negara ini. Bagaimana tidak, orang-orang yang kemudian berkecimpung di dunia politik dengan tujuan membawa perubahan bagi Indonesia, tapi pada kenyataannya ketika kesempatan itu ia peroleh tujuan tersebut seolah terhapus oleh sistem yang ada, dan mayoritas mereka menginginkan perubahan hanya untuk memudahkan kepentingan politik bagi golongannya.

Kebanyakan dari mereka tidak bisa mempertahankan idealisme yang ingin ia capai. Dalam arti singkat, tidak adanya konsistensi dari pelakunya. Sekali lagi ini menunjukkan

bahwasanya dalam dunia politik ada kawasan moralitas yang sangat sensitif, dan ke-sensitifannya itu bisa disebabkan oleh praktek manipulasi yang sudah menjadi tradisi dari para founding father kita, praktek money laundry yang kini tengah booming dibicarakan, KKN yang sudah menjadi adat, *Money Policy*, dll. Namun, tidak berhak dan kurang bijak jikalau kita men-judge para pelaku politik itu dengan predikat negatif, karena banyak juga di antara mereka yang kemudian berjuang mati-matian untuk merubah dan membawa perubahan dan perombakan dalam sistem politik di negara kita.

Melalui tulisan ini, saya tidak bermaksud men-judge negatif para politisi negara kita secara keseluruhan, karena saya tidak mempunyai landasan yang normatif dan tidak mempunyai hak untuk melakukan hal itu. Namun, di sini saya mencoba menuangkan kritikan saya terhadap politisi atau pelaku politik di negara kita, agar mereka bisa bersikap konsisten terhadap tujuan yang ingin mereka capai untuk menyejahterakan dan membawa perubahan bagi bangsanya. Dan perlu kita ingat, jika sekiranya kita mempunyai kesempatan untuk terjun ke dunia politik alangkah lebih baiknya jika kita selalu bersikap konsisten terhadap apa yang kita aspirasikan. Dan sekali lagi hal ini menunjukkan sebuah paradoks yang mungkin sangat menyedihkan yang sayangnya terjadi di negara yang begitu kaya dengan SDA dan mayoritas beragama Islam, seperti Indonesia.

Niccolo Machiavelli atau yang akrab dipanggil dengan Machiavelli adalah salah satu tokoh politik dan tokoh filsafat politik yang hidup pada dalam zaman Renaisans. Tokoh ini terkenal dengan pemikirannya mengenai kekuasaan. Hal tersebut dapat dilihat dalam karyanya yang cukup terkenal, *Il Prince*, Machiavelli di dalam bukunya *Il Prince* membahas mengenai bagaimana seorang pemimpin selayaknya memimpin sebuah negara. Di dalam buku tersebut dibahas beberapa cara yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin untuk mendapatkan, memperbesar serta mempertahankan kekuasaan.

Menurut Machiavelli, seorang raja sudah seharusnya dan selayaknya berwatak bagaikan *Chiron*, yaitu bisa menggunakan sifat manusia dan sifat binatang. Sifat manusia dan binatang tersebut harus digunakan berbarengan. Menggunakan salah satu cara berkuasa tanpa cara lainnya tidak akan berhasil. Hal tersebut direfleksikan dengan sikap dan tingkah laku seorang penguasa seperti menyingkirkan orang-orang yang berpotensi menjadi saingannya, tidak perlu mematuhi segala perjanjian dan peraturan yang ada karena dianggap sebagai faktor penghalang, dan sebagainya.

Machiavelli dalam konsepsinya tersebut nampak tidak bermoral, hal tersebut berlawanan dengan tokoh lainnya, seperti *Thomas Aquinas* (1226 – 1274) dan *Santo Augustinus* (354 – 430) yang berpendapat bahwa suatu negara dalam menjalankan roda pemerintahannya harus sesuai dengan ajaran Tuhan dan penguasa

yang baik harus menghindari godaan kejayaan dan kekayaan-kekayaan duniawi agar memperoleh ganjaran surgawi kelak. Meskipun etika politik ala Machiavelli ini tak bermoral, namun banyak diadopsi dan dipraktikkan oleh beberapa penguasa selama memimpin negaranya baik yang secara terang-terangan maupun secara sembunyi, seperti *Napoleon Bonaparte (Prancis)*, *Louis XVI (Prancis)*, *Adolf Hitler (Jerman)*, *Mussolini (Italia)* serta yang belum lama ini di hukum mati, *Saddam Hussein (Irak)*. Saddam Hussein menjabat sebagai kepala negara (presiden Irak) selama beberapa dekade. Dalam pemerintahannya, ia terbilang sangat keji. Tak segan-segan ia menghabisi semua lawan politiknya. Segala cara dihalalkannya guna mempertahankan dan memperbesar kekuasaannya. Di bawah pemerintahannya, Irak pernah menginvasi ladang minyak milik Iran pada tahun 1980 dan berakhir dengan gencatan senjata pada tahun 1988. Setelah menginvasi Iran, pada tahun 1990 Irak kembali beraksi, kali ini dengan menginvasi ladang minyak milik Kuwait. Dari contoh kasus inilah dapat kita lihat bagaimana selayaknya seorang pemimpin berkuasa ala Machiavelli.

Dari pandangannya mengenai bagaimana peranan penting sebuah agama sebagai salah satu instrumen dalam mengumpulkan serta mengolah kekuasaan, mengindikasikan bahwa wibawa penguasa negara tanpa agama tidak cukup menjamin lestariannya persatuan dan kekuasaan. Pandangan keagamaan Machiavelli ini menarik, karena agama sebagai sebuah institusi sakral tetap perlu terlibat

dalam proses-proses politik. Ini artinya agama tidak bisa dipisahkan begitu saja sekadar karena alasan bahwa agama urusan pribadi manusia dengan Tuhannya sebagaimana diyakini kaum sekularis pada umumnya. Peran agama dalam sebuah negara seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Thomas Hobbes juga sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Machiavelli bahwa agama harus diintervensi sedemikian rupa sehingga dapat menjaga stabilitas kekuasaan seorang pemimpin.

Machiavelli juga berpendapat memiliki angkatan perang yang kuat adalah suatu keharusan yang dimiliki sebuah negara. Angkatan bersenjata merupakan basis penting bagi seorang penguasa negara karena—angkatan bersenjata—manifestasi nyata kekuasaan negara. Menggunakan tentara sendiri akan jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan tentara sewaan. Beberapa alasan mengapa suatu penguasa tidak boleh menggunakan tentara sewaan adalah karena tentara sewaan tidak bisa disatukan, haus akan kekuasaan, tidak berdisiplin, tidak memiliki rasa takut kepada Tuhan, tidak setia kepada penguasa (yang menyewa mereka), tidak setia sesamanya, serta tidak bertanggung jawab, menghindar dari peperangan dan bersifat oportunis.

Pemerintahan-pemerintahan merupakan sejenis organisasi, mereka dan wakil-wakil mereka mengklaim berbagai bentuk kekebalan hukum. Status khusus mereka, seperti dikemukakan di sini, hendaknya tidak menjadi tameng pejabat pemerintah dari tanggung jawab pribadi yang sebagaimana

berlaku pada individu-individu dalam jenis organisasi lain. Sebaliknya, para pejabat pemerintahan mungkin harus memenuhi standar tanggung jawab yang lebih besar. Sama halnya, keberatan-keberatan untuk menjatuhkan sanksi kriminal pada organisasi, berlaku bahkan lebih keras pada pemberian sanksi terhadap organisasi, pemerintahan. Keberatan-keberatan itu lebih keras diterapkan, bukan karena pemerintah menikmati kekebalan khusus, melainkan karena mereka harus menerima tugas-tugas khusus.²⁵

Lima belas tahun setelah jatuhnya Soeharto, Indonesia saat ini dapat dikatakan sebagai negara paling demokratis di Asia Tenggara. Namun konsolidasi demokrasi elektoral telah dibarengi oleh penyebaran luas “organisasi kemasyarakatan” atau ormas yang bergaya militeristik yang sekarang cukup menjadi ciri umum dalam lanskap politik pasca Orde-Baru.²⁶ Proses demokrasi dalam bentuk sistem pemilu, sebagaimana Trocki (1998) berpendapat, sering menjadi dasar munculnya “tokoh lokal predator dan penuh kekerasan”, sedangkan dalam jangka panjang digunakan untuk mengkonsolidasikan persatuan nasional dalam proses politik yang transparan. Di Indonesia dewasa ini, milisi-warga lazim dipandang sebagai adalah bagi munculnya tokoh-tokoh predator tersebut. Namun sejauh kelompok-kelompok terbukti dilihat

²⁵ *Ibid*, h. 112

²⁶ AE Priyono, et al, *Merancang Arah Baru Demokrasi Indonesia Pasca-Reformasi*, PT Gramedia, Jakarta, 2014, h. 773.

sebagai ajang oportunisme politik, maka ini adalah juga merupakan efek dari cara di mana kekuasaan dan otoritas dilegitimasi dan diperebutkan oleh publik tertanam dalam sejarah Orde Baru. Inilah warisan yang terus-menerus membentuk cara-cara di mana otoritas dikonseptualisasikan, dipahami, dan dipraktikkan dalam kelompok-kelompok milisi-warga di seluruh Indonesia hari ini.

Loren Rytter (2009; 215) berpendapat bahwa usaha untuk mengevaluasi tata pemerintahan di Indonesia atas dasar sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi dilaksanakan, berisiko mengevaluasi tata pemerintahan di Indonesia atas dasar sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi dilaksanakan, berisiko mengasumsikan “kategori abstrak” –demokrasi-sebagai dasar yang kurang akurat untuk mendeteksi konfigurasi-konfigurasi kekuasaan di tingkat masyarakat, dan karena itu sangat riskan dipakai untuk mengukur gagal atau berhasilnya demokratisasi. Tampak bahwa Orde Baru dengan warisan UU Ormas-nya secara luas berusaha memanipulasi dan menyalahgunakan milisi sipil sebagai “wakil kekerasan” dalam upaya mengintervensi dan mengontrol masyarakat. Dan penggantinya kini, orde reformasi, tidak mau berurusan terlalu dalam dengan kelompok-kelompok milisi-warga kontemporer dengan mendekati mereka secara lebih formal.²⁷

²⁷ *Ibid*, h. 786.

Pada saat masyarakat menghadapi transisi politik seperti sekarang ini, sudah waktunya kita memikirkan tentang format demokrasi yang tepat untuk masyarakat Indonesia. Mengapa hal itu harus dilakukan? Kalangan ilmuwan politik, mengetahui bahwa demokrasi merupakan sebuah konsep yang bersifat universal, tetapi ketika hendak diimplementasikan, kita akan berhadapan dengan kenyataan bahwa karakteristik sosial masyarakat akan mewarnai implementasi nilai-nilai demokrasi yang bersifat universal tersebut.²⁸

Dari situasi demikian, kita memerlukan reorientasi demokrasi Indonesia pasca-Reformasi. Landasannya adalah kebajikan-kebajikan (*virtues*) tiap-tiap individu yang dihabituasi ke dalam demokratisasi kontekstual serta nilai-nilai politik yang bisa memproduksi perambahan-perambahan alternatif, melunakkan oligarki penghambat reformasi, termasuk memecahkan kebutuhan politik agama. Lewat pembelajaran pengalaman gerakan sosial selama ini, reorientasi itu perlu difokuskan pada transformasi ruang publik-politik berbentuk tekanan publik aktor-aktor sosial dan aktivisme asosiasi-asosiasi warga yang aktif dan partisipatoris. Peluang ruang publik demokrasi digital perlu disambut sebagai alat tambahan untuk dipolitisasi, tidak terkecuali dengan politik kelas dan politik

²⁸ Afan Gaffar, *Politik Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, Cetakan kedua, h. 344.

massa, berkait dengan realitas yang ada dan diarahkan untuk menghasilkan manfaat bagi rakyat dan kebaikan bersama.²⁹

Jika demokrasi bentuk manusia, kemudian dia makhluk yang melata di bumi yang paling digenapi. Dan ketika makhluk ada di Indonesia, dia sudah pun pingsan. Wacana tentang demokrasi, melakukan tercatat pertama 3500 tahun yang lalu. Sejak saat itu dia habis-habisnya berbicara tentang. Dia dianggap sebagai cara untuk secara bersamaan sasaran yang dapat dicapai dalam politik. Tetapi ia jelas bukan cara terbaik untuk mencapai satu tujuan. Winston Churchill mengatakan, demokrasi telah dipilih untuk prinsip ini tingkat segala keburukannya sedikit lebih rendah daripada prinsip politik lainnya.

Demokrasi merupakan nama yang identik dengan kebebasan dalam pengertian yang sangat longgar. Bebas di berfikir, bertindak, suara, dan seterusnya. Pemahaman tersebut adalah apa yang membuat para ahli politik sebagai pengembaraan tak terbatas. Seperti minum air laut, bertambah banyak kita minum, kita sebenarnya naik haus. Untuk lebarnya kemungkinan seperti yang dijanjikan oleh demokrasi, membuat setiap orang merasa berhak untuk bebas mengekspresikan hati-Nya. Orang-orang di sini akan sangat mudah terlempar pemahaman tentang demokrasi, dan tergelincir ke prinsip liberalisasi.³⁰

²⁹ AE Priyono, et al, *op. cit*, h. 847.

³⁰ Riswandha Imawan, *Membedah Politik Orde Baru*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, h. 218

Dalam tinjauan filsafat politik, bahwa setiap tatanan sosial dan politik pada akhirnya pasti didasarkan atas suatu filsafat yang mencakup asumsi-asumsi dan keyakinan-keyakinan dasar mengenai manusia. Karena komunitas politik didesain untuk mencapai tujuan manusia, maka menjadi penting untuk mempelajari apa tujuan-tujuan tersebut. Filsafat politik pada mulanya harus bermula dengan manusia. Struktur teoritis yang didesain pemikir mana pun, pada akhirnya, ditentukan oleh konsepnya tentang watak dan tujuan manusia.³¹ Kebanyakan teori mengenai sifat kekuasaan tergolong ke dalam dua kategori besar: organik dan mekanistik. Karya-karya plato, Aristoteles dan Burke merupakan representasi tipikal dari jenis yang pertama, sementara karya-karya para teoritis kontrak sosial mewakili jenis kedua. Dari kedua jenis kategori teori organik berlaku pada kebanyakan sejarah pemikiran Barat. Menurut pandangan ini, kekuasaan merupakan lembaga etis dengan tujuan moral. Ia merupakan sebuah masyarakat, kumpulan orang-orang yang disatukan dalam upaya kooperatif untuk mencapai tujuan bersama.³²

Teori organik berpandangan bahwa kesatuan politik tubuh dirunut dari predisposisi dalam manusia yang mendorongnya berasosiasi dengan orang lain. Sebagai makhluk rasional, manusia menyadari bahwa kekuasaan lah yang membuat hidup menjadi

³¹ Henry J. Schmandt, *Filsafat Politik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 11.

³² *Ibid.*, h. 16.

mungkin dan produktif bagi mereka. kesatuan moral atau sosial berhasil dari kehendak kolektif mereka untuk berhubungan bersama-sama yang memberi karakter organis pada masyarakat politik. Sebagaimana hukum alam, teori organik memperoleh banyak maknanya di sepanjang waktu. Para pemikir politik yang memiliki ide-ide berlainan mengenai negara dan masyarakat seperti Aristoteles dan Hegel dinilai sebagai pendukung teori ini. persoalannya lebih bersifat semantik daripada substantif.

Inti pokok pemikiran tradisional menganggap negara sebagai kelompok yang diorganisir secara sadar yang para anggotanya memiliki tujuan bersama. Kebaikan (good) seluruh kelompok tersebut bergantung pada pemfungsian yang benar terhadap anggota-anggotanya dan ini pada gilirannya menguntungkan karena eksistensi yang bebas dari independensi para anggotanya yang menciptakannya. Para anggota ini, pada sisi yang lain mempunyai tujuannya sendiri yang terpisah dan berbeda dari keseluruhan masyarakat yang mereka menjadi bagiannya. Setiap anggota melaksanakan fungsinya yang terpisah ini di bawah suatu tatanan yang diarahkan pada kebaikan secara keseluruhan. Fungsi politik merupakan saran dari kehidupan bersama ini.³³

Pemakaian terminologi tradisional oleh Machiavelli, seperti kebaikan umum dan kebajikan, menimbulkan kesulitan besar dalam menafsirkan pemikirannya. Untuk memecahkan

³³ *Ibid*, h.17.

perbedaan yang nampak tidak bisa dirujuk dalam tulisan-tulisannya, kiranya perlu membandingkan istilah-istilah yang digunakannya yang sudah menjadi istilah umum dalam sejarah pemikiran politik dengan makna tradisional yang terkait dengannya. Ketika pemahamannya terhadap pernyataan umum ini dipahami dengan jelas, konsistensi dari teori politik menjadi lebih jelas.

Dalam konsep Yunani-Pertengahan tentang kebaikan umum, terdapat dua unsur pokok: kebaikan haruslah untuk semua orang, bukan bagi keuntungan penguasa atau orang tertentu; dan apa yang baik bagi masyarakat adalah apa yang berakar dalam dan diukur oleh hukum alam, bukan yang didasarkan atas kehendak sewenang-wenang manusia. Machiavelli menerima pendapat yang pertama dan menolak pendapat kedua. Ia menyatakan bahwa pemimpin politik tidak boleh bertindak untuk keuntungannya sendiri tetapi untuk kebaikan semua orang. Jika segala sesuatu yang berhasil dicapai secara moral bisa dikatakan baik, perbedaan Machiavelli dengan arus utama pemikiran Barat tidak begitu besar; tetapi inkonsistensinya dengan mencoba menyamakan keberhasilan dengan kebaikan sangat mencolok.

Machiavelli juga menimbulkan kebingungan dengan pernyataan bahwa raja seharusnya jujur. Namun sekali lagi di sini, pernyataan ini tidak lebih dari ekspresi sikap pragmatis bahwa “kejujuran adalah kebijakan yang terbaik.” Alasan untuk jujur dalam kehidupan masyarakat bukanlah bahwa sikap ini secara etis

benar tetapi karena ia adalah cara bertindak yang paling menguntungkan dalam kondisi tertentu. ‘Jadi kiranya baik untuk mempunyai sifat suka mengampuni, jujur, manusiawi, ikhlas, ali,; tetapi harus mempunyai pikiran yang terbentuk demikian sehingga mempunyai sifat yang sebaliknya.’ Dengan kata lain, seseorang yang mempunyai sifat-sifat ini melaksanakan kebajikan yang berguna dan baik karena umumnya sifat-sifat tersebut membantu mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Kejujuran dan penyelewengan seringkali menyebabkan jatuhnya mereka yang tidak memiliki sifat-sifat tersebut.³⁴

³⁴ *Ibid*, h. 261-262.